

SPIRIT KEWARGANEGARAAN GURU PPKn DALAM MENGHADAPI ISU DEKADENSI MORAL SISWA DI SMP NEGERI 1 LABUHAN DELI

Tawarika M. Pandiangan¹, Alissa P. Simbolon², Samuel Sihite³, Florensia Silaban⁴, Rahmi Siregar⁵, Sri Yunita⁶, Chandra Futhu Neva⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : pandianganawarika@gmail.com, alissapsimbolon@gmail.com, florensiasilaban@gmail.com, rahmisiregar@gmail.com, sriyunita@gmail.com, chandrafuthuneva@gmail.com.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis spirit kewarganegaraan guru PPKn dalam menghadapi fenomena dekadensi moral siswa di SMP Negeri 1 Labuhan Deli. Spirit kewarganegaraan dimaknai sebagai semangat pengabdian guru dalam membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi awal, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam terhadap guru PPKn sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealisme moral guru dengan realitas perilaku siswa yang mengalami kemerosotan nilai, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Meskipun guru telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pembelajaran nilai, pengaruh eksternal seperti media sosial dan budaya permisif menjadi tantangan serius. Spirit kewarganegaraan guru berperan penting sebagai kekuatan transformatif yang mampu membendung arus dekadensi moral melalui pendekatan edukatif, keteladanan, dan nilai-nilai kebangsaan yang konsisten.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Guru PPKn, Dekadensi Moral

The Citizenship Spirit Of PPKn Teachers In Facing The Issue Of Student Moral Decline At SMP Negeri 1 Labuhan Deli

Abstract

This study aims to describe and analyze the civic spirit of PPKn teachers in addressing the phenomenon of student moral decadence at SMP Negeri 1 Labuhan Deli. Civic spirit is defined as the teacher's devotion to shaping student character based on Pancasila values and national principles. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through initial observation, participatory observation, and in-depth interviews with PPKn teachers as key informants. The results show that there is a gap between the teachers' moral idealism and the reality of student behavior that experiences value decline, both in academic and social contexts. Although teachers have demonstrated a high commitment to value learning, external influences such as social media and a permissive culture pose a serious challenge. Teachers' civic spirit plays an important role as a transformative force capable of stemming the tide of moral decadence through an educational approach, role models, and consistent national values.

Keywords: Citizenship, PPKn Teachers, Moral Decadence

1. PENDAHULUAN

Dekadensi moral dapat menjadi virus membahayakan bagi generasi muda terlebih di era globalisasi ini menjadi kerentanan terjadinya perilaku penyimpangan moral yang berdampak pada terganggunya ketertiban dan merugikan diri sendiri, bangsa dan negara. (Istante, 2023). Isu ini telah mewabah sebagaimana dapat dilihat dari beberapa kasus kriminal di media pemberitaan bahkan di lingkungan sekitar dapat ditemukan. Khususnya, dalam kehidupan sekolah ditemukan peserta didik yang tidak taat aturan dan tata tertib sekolah bahkan secara signifikan menaati norma yang berlaku. Jika sekolah didominasi para peserta didik dengan tingkat prakonvensional oleh teori perkembangan moral Kohlberg tentu mengancam keberhasilan sekolah dalam mencetak peserta didik yang berkualitas sebagai generasi muda yang kelak menjadi warga negara yang berkompeten. (Yaqin, 2021).

Dekadensi moral dapat terjadi melalui faktor internal yang datang dari dalam diri seseorang seperti nyaman dengan sikap lemahnya menjaga kehormatan diri sendiri maupun orang lain, egoisme dan krisis identitas hingga pada faktor eksternal terjadi akibat pengaruh dari luar seperti pola didik yang salah dari lingkungan keluarga, masyarakat, menormalisasikan hal yang sebenarnya melunturkan nilai moral melalui tampilan gaya hidup di sosial media dan akhirnya ditiru. (Asrori & Munawir, 2020). Dekadensi moral mengakibatkan sulitnya negara Indonesia meraih bonus demografi karena pada siklus waktu berjalan kedepan, negara ini membutuhkan generasi muda yang berkompeten sebagai generasi penerus

bangsa dan mustahil hanya mengandalkan peran golongan tua yang secara biologis dan potensi energi mulai melemah dibandingkan generasi muda yang memiliki vitalitas energi, fisik yang baik serta kemampuan adaptif menerima ide-ide inovatif lebih terandalkan. (Yananda et al., 2022).

Berbagai aspek pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan lain-lain secara komprehensif mengalami kemerosotan akibat dari akarnya negara Indonesia masih dikendalikan oleh orang-orang yang immoral. Berangkat dari kondisi ini, sewajibnya adanya upaya pembekalan moral yang senantiasa digerakkan oleh dukungan Pemerintah bersama satuan pendidikan. Kepercayaan pada pendidikan bekerja sama dengan plastisitas otak manusia hingga merangsang pertumbuhan neurosins dan jalur neura dalam membentuk warga negara yang Desirable Personal Quality. (Dahlan et al., 2025). Pendidikan memegang konsep membelajarkan seseorang menjadi lebih mampu secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Guru di dalam pendidikan secara parsial dan beraneka ragam terdiri latar belakang keilmuan yang berbeda seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, agama, PPKn dan lain sebagainya. Namun, bukan sebatas keilmuan tersebut seperti contohnya guru matematika beramsumsi dirinya tidak pantas mengajarkan moral yang baik kepada peserta didik karena tidak menjadi bagian dari ontologi, epistemologi maupun aksiologi keilmuan matematika dalam mengajarkan moral tetapi terpaku pada guru agama dan guru PPKn. Jelas hal ini tidak tepat karena menjadi seorang guru tidak hanya berfokus dalam transfer ilmu pengetahuan akademik saja tetapi berhak beriringan mengajarkan anak tentang moral yang baik. Hal tersebut menjalankan amanah sebagai syarat guru yang berkualitas sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa terdapat 4 (Empat) kompetensi yang harus dipenuhi seorang guru yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Sejatinya akar masalah terhambatnya pembangunan negeri ini terletak pada masalah krusialnya adalah bangsa Indonesia diisi oleh orang-orang yang memiliki immoral (lemah moral atau tidak bermoral). Virus dekadensi moral berdampak secara komprehensif pada lajunya pembangunan negeri ini. Analoginya, jika warga negara diisi oleh orang-orang cerdas tetapi lemah moral intinya tetap saja sia-sia. Negara ini lebih mengutamakan adab dan moral agar di masa depan dapat menjaga dan menaati norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, kesucilaan, kesopanan, hukum dan adat istiadat.

Spirit kewarganegaraan adalah sebuah semangat atas kesadaran suatu warga negara mempercayai personanya harus memiliki kompetensi sebagai warga negara yang baik, cerdas dan dapat diandalkan hingga kompetensi ini dapat diberdayakan baik dalam menjaga integritas bangsa maupun negara serta berkontribusi dalam membentuk lagi warga negara yang berkompeten. Spirit kewarganegaraan boleh dimiliki setiap warga negara Indonesia yang berakal sehat. Berangkat dari peranan pendidikan, khususnya secara eksplisit pembelajaran mengenai moral ini difokuskan dalam kurikulum pembelajaran PPKn telah berupaya membentuk spirit kewarganegaraan bangsa Indonesia.

Ketika guru PPKn sudah memiliki 4 (empat) standar kompetensi sebagaimana memenuhi Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 sejatinya ada spirit kewarganegaraan yang mendorong semangat bakal guru untuk menjadi guru yang berkualitas dan dapat berkontribusi memajukan pendidikan bangsa. Berangkat dari penelitian awal sebelum dilakukan wawancara pengumpulan data, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara pendahuluan dengan salah satu guru PPKn di SMP Negeri 1 Labuhan Deli di hari pertama penelitian dalam rangka memahami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di lapangan dan menetapkan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekolah dan wawancara pendahuluan dengan guru bahwa benar isu dekadensi oleh siswa masih marak terjadi dan dari kondisi tersebut proses pembelajaran yang semestinya dilaksanakan dengan serius mengalami dilema sebab dari temuan peneliti di ruang kelas yang sedang melaksanakan pembelajaran PPKn terdapat sikap maupun perilaku yang ditampilkan dari banyaknya peserta didik tidak menghargai guru dalam melakukan transfer pengetahuan. Keadaan kelas tidak kondusif disebabkan peserta didik fokus mengobrol dan bermain saat inti pembelajaran dilaksanakan. Bahkan ditemukan peserta didik melawan dengan verbal terhadap guru yang diketahui sedang menegur dirinya. Hal ini tentu secara garis besar adalah masih maraknya virus dekadensi moral.

Selain itu, terdapat celah spirit kewarganegaraan yang diaktualisasikan oleh guru PPKn selaku narasumber pada penelitian ini bahwa mengakui guru PPKn tersebut pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau istilah saat ini adalah PPG. Dari keikutsertaan guru PPKn tersebut artinya dianggap memiliki spirit kewarganegaraan melalui kontribusi dirinya menjadi guru yang berkompeten. Mengingat dari tujuan diselenggarakan program PLPG adalah meningkatkan kompetensi guru maka penelitian ini mendapat celah untuk mengkaji lebih dalam melalui wawancara pengumpulan data yang pada tahap selanjutnya dilaksanakan peneliti untuk mengkaji lebih dalam spirit kewarganegaraan guru PPKn tersebut di SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini menjadi novelty bagi penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu belum ditemukan pada fokus penelitiannya adalah peran spirit kewarganegaraan guru

PPKn dalam menghadapi isu dekadensi moral siswa sebagaimana pada judul penelitian ini adalah “ Spirit Kewarganegaraan Guru PPKn Dalam Menghadapi Isu Dekadensi Siswa di SMP Negeri 1 Labuhan Deli”. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kekuatan spirit kewarganegaraan guru PPKn di SMP Negeri 1 Labuhan Deli dalam menghadapi berbagai karakteristik isu dekadensi moral peserta didik yang secara aktual terjadi.

Spirit Kewarganegaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa persamaan kata dari makna spirit adalah ‘semangat’ yang merujuk pada antusiasme dan semangat tinggi yang dimiliki seseorang, juga terdapat padanan dengan kata ‘roh’, ‘sukma’ dan ‘jiwa’ yang merujuk pada bagian dari batin manusia yang membuat seseorang hidup atau berkeinginan. Selain itu, untuk makna dari kewarganegaraan adalah status seorang warga negara Indonesia yang sah memiliki hak dan kewajiban serta keterikatan hukum pada negara yang didiami.

Berangkat dari makna pada spirit dan kewarganegaraan menunjukkan relasi makna bahwa spirit kewarganegaraan merupakan penunjukkan secara aktual semangat dari warga negara Indonesia atas kesadarannya mendapatkan peran dalam kewarganegaraan. Kesadaran ini berangkat dari pemahaman kuat warga negara terhadap nilai-nilai norma yang harus dijaga dan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya berdampak positif baik bagi dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berkompeten hingga berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara kuat dalam konsep integritas nasional.

Jauh sebelum negara Indonesia merdeka, sebuah catatan sejarah penting menunjukkan spirit kewarganegaraan telah diterapkan oleh para pahlawan nasional yang telah berjuang meraih kemerdekaan seratus persen Indonesia. Keberadaan pembelajaran PPKn baik ditingkat sekolah hingga perguruan tinggi merupakan bagian dari spirit kewarganegaraan yang diaktualisasikan melalui kurikulum untuk mempersiapkan warga negara yang baik, cerdas dan bertanggung jawab atau secara komprehensif memperkuat dari segi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) dalam konsep kewarganegaraan. (Maulana, 2025).

Dalam ranah pendidikan, adanya harapan baik pada tenaga pendidik dengan spirit kewarganegaraan yang dimiliki untuk menjadi teladan, motivator, fasilitator, dan perekayasa pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, serta mendorong siswa untuk memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Guru PPKn berperan aktif dalam merancang kegiatan pembelajaran, mengelola kelas yang kondusif, dan membimbing peserta agar mampu menginternalisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (Gulo et al., 2024).

Di luar dari keberhasilan pendidikan kewarganegaraan mencetak warga negara yang berkompeten, ada elemen tambahan dari keberadaan spirit kewarganegaraan yakni budaya bangsa Indonesia contohnya tradisi tenun ulos yang diselenggarakan untuk menjaga warisan budaya batak toba yang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia juga seperti budaya gotong royong hadir di hampir setiap suku di Indonesia, dengan berbagai istilah seperti Sambatan di Jawa, Rambu Solo' di Toraja, Marsialapari di Mandailing, dan Pangari di Batak Toba dan lain sebagainya menunjukkan makna membangun persatuan dan solidaritas antar sesama masyarakat dalam mencapai tujuan mulia. Masih banyak budaya bangsa Indonesia yang lainnya erat pada penguatan spirit kewarganegaraan. Negara tanpa spirit kewarganegaraan akan tidak memiliki identitas kolektif dan partisipasi warga negara yang kuat, menyebabkan masyarakatnya tidak merasa terikat satu sama lain atau pada negara. Akibatnya, negara akan sulit menjaga stabilitas dan kemajuan karena lemahnya dukungan dari warga negara dalam membangun negara, seperti dalam urusan politik, sosial, dan keamanan.

Dekadensi Moral

Dekadensi moral memiliki makna penurunan nilai moral yang dialami oleh individu bahkan sekelompok orang, hal ini terjadi atas kehendak diri sendiri atau ketidaktenangan jiwa, kekecewaan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan yang mengakibatkan enggan menerima nilai-nilai positif untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan atau bahkan adanya tekanan pengaruh luar yang menanamkan nilai buruk pada rusaknya moral seseorang terlebih di era globalisasi ini. (Istante, 2023). Terlebih berdasarkan data Survey Yougov atau sejalan dengan data survei lain terdapat sekitar 81 % masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial dan nyatanya dibalik hal ini rentan memberikan dorongan dekadensi moral melalui akselerator konten negatif, ruang tanpa batasan etis, pencarian sensasi dan validasi dan lain sebagainya. Beragamnya isu dekadensi moral yang dapat dipertontonkan secara nyata baik dari lingkungan sekitar maupun berbagai media informasi yang memberitakan tentang tindakan kriminal seseorang maupun sekelompok orang. (mediaasuransinews.co.id, 2025).

Dekadensi moral memiliki dimensi yang lebih kompleks ketika dilihat melalui lensa yang sedikit lebih kritis. Ini bukan sekadar kegagalan pribadi; ini adalah fenomena sosial, yang seringkali terkait

dengan pergeseran budaya, struktur ekonomi, dan bahkan arus bawah psikologis. Pada tahap ini, mulai mempertimbangkan sistem dan kekuatan yang mungkin berkontribusi terhadap persepsi penurunan standar moral ini. Penting untuk menyadari bahwa menilai "dekadensi" itu sendiri merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh budaya, tetapi pola yang diamati dalam perilaku masyarakat dapat menunjukkan pergeseran nilai. (Istante, 2023).

Budaya menyimpang dirancang untuk terus-menerus memicu hasrat, seringkali menciptakan kebutuhan yang sebelumnya tidak ada. Pemasaran, media, dan norma sosial seringkali memperkuat gagasan bahwa kebahagiaan ditemukan dalam perolehan. Pengejaran lebih yang tak henti-hentinya ini dapat menyebabkan semacam kelelahan etis. Ketika nilai terutama diukur berdasarkan harta benda atau pengalaman sesaat, nilai-nilai yang lebih dalam seperti komunitas, integritas, atau pengelolaan lingkungan dapat terpinggirkan. Hal ini menciptakan lanskap sosial tempat Dekadensi Moral dapat berakar secara halus, bukan melalui niat jahat yang disengaja, melainkan melalui sistem yang merajalela yang memprioritaskan konsumsi di atas segalanya. (Syarif, 2020).

Konsumerisme, dengan penekanannya pada perolehan materi dan kepuasan instan, secara tidak sengaja dapat berkontribusi pada Dekadensi Moral dengan mengalihkan fokus dari nilai-nilai yang lebih dalam dan lebih abadi. Melihat melalui perspektif sosiologis, dapat mengkaji bagaimana struktur sosial berkontribusi. Meningkatnya ketimpangan ekonomi, misalnya, dapat memicu perasaan sinisme dan ketidakpercayaan. Ketika sistem terasa curang atau tidak adil, insentif untuk mematuhi standar moral kolektif dapat melemah. Jika sebagian orang merasa bahwa aturan dibengkokkan demi kepentingan segelintir orang yang memiliki hak istimewa, rasa kekecewaan dapat menyebar, menciptakan lingkungan di mana Dekadensi Moral, dalam bentuk berkurangnya kohesi sosial dan kompromi etika, menjadi lebih umum. Hal ini bukan untuk membenarkan perilaku tidak etis, melainkan untuk memahami konteks sosial yang dapat memperburuknya.

Secara psikologis, bombardir informasi dan stimulasi yang terus-menerus di dunia modern dapat menyebabkan semacam desensitisasi moral. Terpapar begitu banyak penderitaan, ketidakadilan, dan kompromi etika melalui berita dan media sehingga hal itu dapat menjadi hal yang lumrah, bahkan hampir menjadi kebisingan latar belakang. 'Kelelahan welas asih' ini dapat menumpulkan respons emosional kita dan membuat kita kurang tertarik untuk terlibat dengan isu-isu etika, yang berkontribusi pada pergeseran kolektif menuju Dekadensi Moral. Banyaknya stimulus dapat membanjiri kapasitas manusia untuk berempati dan berefleksi etika, menciptakan hambatan psikologis terhadap keterlibatan moral.

Hubungan Spirit Kewarganegaraan Guru PPKn dengan Dekadensi Moral

Penggunaan kompetensi oleh guru PPKn dalam menyukkseskan tujuan pembelajaran itu sendiri hingga secara signifikan berkontribusi mencetak peserta didik mengenal dan mengimplementasikan adab ilmu dalam kehidupan sehari-hari merupakan terbentuknya korelasi pada spirit kewarganegaraan. Spirit kewarganegaraan merupakan rasa hormat dari seseorang terhadap nilai-nilai dan aturan beradab dalam membentuk tatanan masyarakat, serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi menjaga kelangsungan dan kemajuan negara dan masyarakat. Definisi ini berkorelasi positif dengan semangat dan daya juang seorang guru PPKn melalui pembelajaran formal mengajak peserta didik untuk merealisasikan konsep spirit kewarganegaraan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Septi Sari dkk. (2023) yang berjudul " Peran PPKn dalam Mencegah Kemerosotan Nilai Moral pada Generasi Muda di Era Modern " memberikan penguatan teori atas hubungan spirit guru PPKn dengan dekadensi moral melalui penegasannya bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral generasi muda di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Di tengah maraknya paham-paham luar yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti individualisme, hedonisme, dan gaya hidup permisif yang kerap tersebar melalui media sosial, guru PPKn diharapkan tidak hanya menjadi pengajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi agen perubahan moral dan teladan nilai-nilai Pancasila. Spirit kewarganegaraan yang dimiliki guru PPKn yang tercermin dari komitmen, kepedulian, dan kesadarannya dalam menanamkan nilai kebangsaan dan moral merupakan faktor penting dalam membendung krisis moral peserta didik. Keteladanan guru, penguatan nilai melalui pembelajaran kontekstual, serta pembiasaan perilaku positif di lingkungan sekolah, menjadi strategi konkret untuk mengatasi dekadensi moral yang semakin mengemuka di kalangan pelajar.

Guru PPKn dapat menempatkan posisi Agent of Change saat bersinergi dan tidak pantang menyerah dalam membentuk peserta didik selaku generasi muda untuk menjadi bagian dari civic knowledge, civic disposition dan civic skill. Namun, pada realitanya masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan guru dalam membentuknya akibat benturan keras perilaku dekadensi moral oleh peserta didik yang paling utama. Analoginya, ketika jam pembelajaran yang semestinya dilaksanakan dengan lancar namun hal itu hanyalah tabu sebab dominan sikap peserta didik yang tidak kondusif atau tidak beretika saat pembelajaran diberlangsungkan hanya memakan waktu sia-sia. Guru mengalami distraksi dalam memberikan pengajaran yang baik, akibatnya banyak waktu yang tersita hanya untuk menjadikan

kelas lebih kondusif. Demikian kehidupan diluar kelas, ditemukan peserta didik melakukan perilaku menyimpang yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat bahkan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Berangkat dari permasalahan tersebut, disini kekuatan spirit kewarganegaraan yang sangat dibutuhkan oleh seseorang dalam rangka memperbaiki gejala kerusakan moral yang dialami oleh peserta didik. Masih dengan statusnya sebagai peserta didik di sekolah usai melakukan perilaku menyimpang, maka pada kesempatannya para guru terkhusus guru PPKn dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pendekatan persuasif maupun upaya edukatif atau tidak hanya sekedar memberikan hukuman agar peserta didik diharapkan dapat segera sadar dalam membentuk perilaku yang bermoral.

Hal ini bukan memberikan penilaian sepihak bahwa guru PPKn yang berpotensi dalam membentuk moral baik peserta didik sebab menimbang secara ekspilist bahwa guru PPKn lebih kuat fokusnya dalam tujuan pembelajaran PPKn secara inheren menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral Pancasila agar menjadi pedoman hidup dan tindakan individu warga negara, serta membentuk karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut. Secara kritis, keterkaitan ini dapat dipahami melalui upaya PPKn untuk membentuk karakter yang beretika, menyajikan nilai-nilai moral sebagai dasar hukum, mengembangkan pemikiran kritis terhadap nilai dan norma, serta menghadapi tantangan modernisasi. Beberapa penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap penelitian sebelumnya secara garis besar dikategorikan masih berpaku pada upaya guru PPKn dalam melawan dekadensi moral karena pada hasilnya belum sepenuhnya dapat membuat peserta didik lebih beradab.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sejalan dengan pandangan Moleong (2008:6) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan untuk memotret perilaku, fenomena, atau keadaan secara mendalam, dengan hasil temuan berupa uraian kata-kata yang memberikan pemahaman tentang objek penelitian tersebut, bukan angka atau statistik. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni hasil wawancara dengan salah satu guru PPKn di SMP Negeri 1 Labuhan Deli sebagai narasumber atau subjek penelitian. Untuk sumber data sekunder yang digunakan adalah beberapa referensi yang sejalan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal laporan penelitian dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni melakukan observasi awal sebagai tindakan memastikan bahwa lokasi penelitian yang dipilih benar-benar relevan dengan fokus penelitian, memungkinkan akses data yang memadai, serta memiliki karakteristik subjek yang sesuai. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam memutuskan kelayakan lokasi sebagai tempat pengumpulan data utama. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan yang bersifat lebih terarah dan digunakan untuk menangkap data empiris yang berkaitan langsung dengan variabel atau isu yang diteliti.

Hasil dari observasi lapangan menjadi bahan utama dalam analisis dan penarikan kesimpulan penelitian. Langkah selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan salah satu guru PPKn selaku informan penelitian dan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan kredibel dilakukan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, maupun publikasi lain yang memuat teori, konsep, atau hasil penelitian terdahulu.

3. PEMBAHASAN dan HASIL

Berangkat dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya relevansi yang kuat antara kondisi lapangan dengan fokus permasalahan penelitian, yakni isu dekadensi moral di kalangan peserta didik. Observasi dilakukan pada hari pertama melalui pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di beberapa kelas. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perilaku yang mencerminkan kemerosotan nilai moral, antara lain kurangnya etika dalam berinteraksi dengan guru, minimnya rasa hormat terhadap teman sekelas, serta penggunaan bahasa yang kurang santun selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, tampak pula indikasi rendahnya kepedulian sosial dan sikap individualistik, yang terlihat dari kurangnya kerja sama antar siswa, ketidakteraturan dalam menjaga kebersihan kelas, serta lemahnya partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Gejala-gejala tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai dan norma yang berlaku, khususnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi bagian dari penguatan karakter peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai moral dalam konteks pendidikan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, lokasi penelitian dinilai layak dan representatif untuk dikaji lebih lanjut, karena mencerminkan secara nyata permasalahan dekadensi moral yang menjadi fokus utama penelitian ini. Oleh karena itu, observasi awal ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk melanjutkan proses pengumpulan data dan analisis dalam tahapan penelitian selanjutnya.

Lebih lanjut, indikasi dekadensi moral juga ditemukan di luar ruang kelas. Peneliti mengamati adanya sejumlah peserta didik yang dengan sengaja meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran berlangsung untuk pergi ke kantin tanpa izin, yang menunjukkan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Tidak hanya itu, beberapa siswa juga terlihat membuat keributan di area lapangan sekolah pada saat proses belajar sedang berlangsung, yang menimbulkan resonansi suara bising dan mengganggu konsentrasi kelas lain. Ditemukan pula praktik perundungan verbal secara halus antar peserta didik saat berada di lorong sekolah maupun di lingkungan kantin, serta penggunaan gawai untuk mengakses konten hiburan yang tidak relevan dengan kegiatan belajar. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa permasalahan dekadensi moral tidak hanya terbatas pada perilaku di dalam kelas, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan siswa di lingkungan sekolah secara lebih luas.

Pada tahap selanjutnya, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan guru PPKn selaku informan kunci, ditemukan adanya hambatan signifikan dalam implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru PPKn telah berupaya secara maksimal untuk menerapkan spirit kewarganegaraan dalam pembelajaran di kelas, namun pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi terletak pada kondisi kelas yang cenderung tidak kondusif. Peserta didik menunjukkan perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai moral, seperti memilih bermain, saling mengobrol selama pelajaran berlangsung, hingga memberikan tanggapan yang tidak etis ketika diberi teguran oleh guru, termasuk membantah atau bahkan melawan instruksi yang diberikan. Situasi ini mencerminkan rendahnya kesadaran moral dan disiplin peserta didik, yang berdampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran.

Meskipun demikian, secara substansial, guru PPKn tersebut telah menunjukkan komitmen dan semangat dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini tercermin dari sikap profesional yang ditunjukkan, antara lain dengan memanfaatkan waktu luang untuk menguasai kembali materi ajar, sudah mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta menyusun media pembelajaran secara mandiri. Namun, segala upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan ketika diimplementasikan di ruang kelas. Tekanan akibat rendahnya respon peserta didik terhadap pembelajaran, ditambah dengan gelombang dekadensi moral yang kuat, turut memengaruhi kondisi psikologis guru. Guru PPKn tersebut mengalami kebingungan, kecemasan, dan kegelisahan dalam menghadapi realitas pembelajaran yang tidak sejalan dengan harapan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan di sekolah tidak hanya berasal dari aspek pedagogis, tetapi juga dari kompleksitas dinamika sosial siswa yang dipengaruhi oleh kemerosotan nilai moral di era modern.

Temuan hasil penelitian dengan guru PPKn menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara spirit kewarganegaraan yang dimiliki oleh guru dengan realitas perilaku moral peserta didik. Guru PPKn telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pendidik yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara yang berintegritas, bertanggung jawab, dan sadar akan hak serta kewajibannya. Namun, semangat ini kerap kali tidak menemukan resonansi yang setara dari peserta didik, yang justru menunjukkan kecenderungan pada perilaku menyimpang baik di dalam maupun di luar kelas. Dekadensi moral, sebagaimana tampak dalam berbagai bentuk seperti ketidakpatuhan, kurangnya rasa hormat, serta keterlibatan dalam perilaku negatif lainnya, menjadi tantangan yang nyata dalam proses pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktural yang lebih luas, seperti arus globalisasi nilai, penetrasi budaya populer melalui media sosial, serta krisis identitas yang melanda generasi muda.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya bertugas membentuk karakter dalam bingkai kewarganegaraan nasional, tetapi juga harus mampu menjawab tuntutan zaman yang mengharuskan setiap individu memiliki kesadaran sebagai warga negara global. (Istianah & Komalasari, 2023). Seiring dengan kompleksitas tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, konflik budaya, dan radikalisme Civic Education harus mengembangkan pendekatan transformatif yang berorientasi pada pembentukan kompetensi global peserta didik. Hal ini meliputi kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu global, empati lintas budaya, keterampilan komunikasi antarbudaya, serta sikap terbuka terhadap keberagaman. Civic Education dalam kerangka global bukan hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban, melainkan juga mengarahkan peserta didik untuk menjadi aktor sosial yang aktif, berpartisipasi dalam upaya-upaya kolektif demi keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Spirit kewarganegaraan yang dimiliki guru PPKn memiliki potensi besar sebagai motor penggerak perubahan. Meskipun menghadapi resistensi dari peserta didik yang telah terpapar nilai-nilai permisif dan budaya instan, spirit tersebut menjadi kekuatan moral yang mampu menahan dan bahkan membalikkan arus dekadensi moral. Guru PPKn tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai agen transformasi sosial yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, menghargai keberagaman, dan mengembangkan kesadaran global melalui pendekatan yang kontekstual dan dialogis.

Dalam era yang ditandai oleh meningkatnya konflik antarbudaya dan ketegangan identitas, seperti yang disoroti oleh Huntington dan diperkuat oleh studi PPIM (2018) mengenai pandangan keagamaan fundamentalis di kalangan pendidik, peran guru sebagai penyeimbang ideologi dan penjaga keberagaman menjadi sangat krusial. Jika pendidikan kewarganegaraan tidak diarahkan pada penguatan perspektif multikultural dan global, maka sangat mungkin peserta didik akan terjebak dalam pandangan sempit, eksklusif, dan intoleran. (Baidhaw, 2005).

Oleh karena itu, Civic Education di Indonesia perlu melakukan reorientasi dan revitalisasi kurikulum agar mampu mengintegrasikan isu-isu lokal, nasional, dan global dalam satu kerangka pembelajaran yang utuh. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak terbatas pada pengetahuan kognitif, tetapi juga mencakup pembangunan karakter, nilai, dan keterampilan sosial. Pendekatan progresif dalam Civic Education menekankan pada pendidikan melalui partisipasi aktif, interaksi lintas budaya, serta penguatan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. (Khoerudin, & Sassi, 2024). Dalam hal ini, pengembangan kesadaran akan keberagaman budaya menjadi aspek penting dalam membentuk warga negara global yang bertanggung jawab. Kesadaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan nasional yang pluralistik seperti Indonesia, tetapi juga untuk membangun relasi sosial yang konstruktif di tengah masyarakat global yang saling terhubung.

Kesadaran sebagai warga negara global yang menghargai keberagaman budaya merupakan fondasi penting dalam membangun dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan. Ketika peserta didik diajak untuk melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas global, mereka akan terdorong untuk bertindak tidak hanya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, tetapi juga demi kebaikan bersama umat manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Civic Education yang tidak hanya berlangsung secara formal di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman belajar yang otentik, partisipatif, dan berbasis pada realitas sosial. Guru PPKn, dengan spirit kewarganegaraannya, memegang peran kunci dalam membimbing peserta didik menuju pemahaman yang lebih luas tentang hakikat kewargaan di era global. Ketika guru tetap teguh memegang nilai-nilai dasar seperti tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kepercayaan, maka harapan untuk membangun generasi yang bermoral, berakarakter, dan berkesadaran global masih terbuka lebar. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan akan tetap menjadi instrumen strategis dalam membentuk warga negara abad ke-21 yang tidak hanya baik secara moral, tetapi juga cakap dalam berinteraksi di dunia yang penuh dengan kompleksitas dan keberagaman.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa spirit kewarganegaraan guru PPKn di SMP Negeri 1 Labuhan Deli tercermin melalui komitmen, keteladanan, dan pendekatan edukatif yang konsisten sebenarnya dapat membentuk kemampuan moralitas peserta didik. Meskipun dihadapkan pada tantangan serius berupa dekadensi moral peserta didik, guru tetap memainkan peran strategis sebagai agen perubahan melalui penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dan penerapan pendekatan humanis. Namun, keberhasilan transformasi moral siswa sangat membutuhkan kerjasama dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, serta kemampuan adaptasi terhadap arus nilai global yang masuk melalui media dan budaya luar. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kontekstual dan transformatif menjadi kunci dalam menghadapi krisis moral generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Achmad, A. (2025, 31 Agustus). YouGov: Kebiasaan konsumsi media masyarakat berubah. Media Asuransi News. Diakses 27 September 2025, dari <https://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/yougov-kebiasaan-konsumsi-media-masyarakat-berubah>
- Asrori, A., & Munawir, M. (2020). Anomali Perilaku Remaja Dialektika Fitrah Manusia dan Pendidikan Islam.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). Kamus Besar Bahasa Indonesia [Daring]. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Baidhaw, Z. (2005). Pendidikan agama berwawasan Multikultural. Erlangga.
- Dahlan, D., Lahmi, A., & Hakim, R. (2025). INTEGRASI KERJA OTAK DALAM PROSES PENDIDIKAN DAN BELAJAR. AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 7(2), 265-278.
- Gulo, A. S., Harefa, A., Lase, F., & Lase, B. P. (2024). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perilaku Peserta Didik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(10), 11164-11174.
- Istante, L. (2023). Dekadensi moral bagi generasi muda. Student Research Journal, 1(1), 21-31.
- Istianah, A., & Komalasari, K. (2023). Dampak Isu Global Terhadap Jati Diri Bangsa Dan Karakter Ke Indonesiaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Asanka: Journal Of Social Science And Education, 4(1), 97-107.

- Khoerudin, M., & Sassi, K. (2024). Potret Ekstensif Tujuan Global Citizenship Education (GCE) di Norwegia. *Bestari: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 216-237.
- Maulana, R. B. (2025). URGENSI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KOMPETENSI WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BERKARAKTER DI ERA DISRUPSI DIGITAL. *Raditya Bintang Maulana*.
- Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Sari, D. S., Sandika, I., & Saragih, D. (2023). Peran PPKN Dalam Mencegah Kemerossotan Nilai Moral Yang Terjadi Pada Generasi Muda Di Era Modern. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 242-249.
- Syarif, M. Z. H. (2020). Pendidikan Islam dan moralitas sosial: Upaya preventif-kuratif dekadensi moral dan kehampaan spiritual manusia modernis. *Prenada Media*.
- Yananda, M. R., Rahadian, A., Hastiadi, F. F., Nagara, G., & Firdaus, B. (2022). *Skenario Masa Depan Indonesia 2045: Pemimpin & Masyarakat*. Cikini Art Stage.
5. Yaqin, A. (2021). *Pendidikan Akhlak/Moral Berbasis Teori Kognitif-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada